



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SENIN, 18 MARET 2013



DAFTAR ISI

Air Bersih	1
Trans-Sumatera	2
Pelabuhan	3
Pabrik Semen	4
Infrastruktur	5
Akses Bandara	6
Produksi Minyak	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Sege ra Ben ahi Tata Kel ola Air Ber sih	<div>- Perbaiki tata kelola air dilakukan dengan membentuk satu lembaga yang mengelola air bersih dan SDA</div> <div>- Sebagian kalangan menilai, masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah minimnya sumber air baku</div> <div>- Subsidi air bersih di Jakarta baru dalam tahap rencana</div>					

INFRASTRUKTUR

Sege
ra
Ben
ahi
Tata
Kel
ola
Air
Ber
sih

JAKARTA, KOMPAS — Krisis air bersih yang melanda ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya tak bisa dibiarkan. Pemerintah harus membenahi tata kelola air bersih dan sumber daya air. Persoalan ini tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga tanggung jawab pemerintah pusat untuk mencari solusi.

"Langkah yang harus dilakukan saat ini adalah membenahi tata kelola air bersih, memastikan ketersediaan air baku, dan pada saat yang bersamaan mempercepat negosiasi ulang dengan operator air bersih," kata anggota Dewan Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Firdaus Ali, Selasa (19/3).

Perbaiki tata kelola air dilakukan dengan membentuk satu lembaga yang mengelola air bersih dan SDA. Lembaga ini harus diberi hak untuk merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sarana sumber daya air. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kepada lembaga khusus ini untuk menjalankan tugasnya.

Namun, pemerintah seperti ini abai dengan persoalan tersebut. Pemangku kepentingan tak menjalankan kewajibannya hingga beban berat harus ditanggung konsumen. Bila hal itu dibiarkan terus, menurut Firdaus, kompleksitas persoalan ini bisa memicu persoalan ekologi, sosial, dan ekonomi yang lebih berat.

Dewan SDA DKI Jakarta mencatat, produksi air bersih di Jakarta saat ini 18,7 meter kubik per detik. Adapun kebutuhan sebenarnya mencapai 29,6 meter kubik per detik dengan asumsi jumlah penduduk DKI 9,6 juta jiwa.

Firdaus memperkirakan, kebutuhan meningkat menjadi 41,3 meter kubik per detik pada tahun 2025 dengan asumsi jumlah penduduk 14,6 juta jiwa. "Jika belum ada solusi krisis air saat ini, Jakarta dan wilayah sekitarnya akan memperebutkan sumber air yang sama," katanya.

Keragaman sumber

Sebagian kalangan menilai, masalah mendasar yang terjadi saat ini adalah minimnya sumber air baku. Suplai air DKI sangat bergantung pada wilayah sekitarnya. Kepala Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta Kris Tetuko berpendapat, saat ini memperbanyak sumber air baku untuk mengatasi defisit air.

Penambahan air baku tak dapat dilakukan sendiri. Harus ada kerja sama antarpemerintah daerah di hulu dan hilir Kanal Tarum Barat. Kerja sama diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kanal sehingga dapat mengurangi kadar pencemaran yang semakin tinggi.

Operator air PT Palya dan PT Aetra sependapat dengan ide tersebut. "Banyak warga yang belum menerima pasokan air bersih. Pasokan yang terjamin memper-

kecil persoalan yang terjadi di masyarakat bawah," kata Meyritha Maryanie, Corporate Communications and Social Responsibilities Head Palya.

Corporate Secretary PT Aetra Bambang Hernowo justru menuding pemerintah tidak bekerja maksimal. "Kami belum melihat upaya serius pemerintah mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Subsidi

Tidak cukup dengan itu, sejumlah pihak mendesak pemerintah memberikan subsidi untuk infrastruktur air bersih dan tarif. Nana M Arifjaya, dosen hidrologi daerah aliran sungai pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mengatakan, subsidi pemerintah belum berjalan karena pendanaan untuk infrastruktur pipa sangat mahal.

Begitu juga subsidi melalui tarif. Se jauh ini, tarif diserahkan ke mekanisme pasar melalui perhitungan seluruh biaya pengelolaan dan investasi air bersih yang bertumpu pada tarif.

Model pembiayaan ini yang menyebabkan tarif air menjadi beban berat warga. Pada sistem full cost recovery, peran pemerintah nyaris tidak ada. Sebab, semua beban pengelolaan dan investasi menjadi tanggung jawab konsumen yang membayar tarif. Meski tarif tidak naik lagi sejak tahun 2007, selisih tarif dan imbalan (water charge) yang diklaim operator menjadi beban

PAM Jaya yang menggunakan uang konsumen.

Menurut Firdaus, subsidi air bersih sudah lazim di negara maju. Di Kota Taipei, Taiwan, misalnya, subsidi diberikan tak hanya kepada warga miskin, tetapi juga untuk kalangan industri.

Sementara itu, subsidi air bersih di Jakarta baru dalam tahap rencana seperti yang disampaikan Direktur Utama PD PAM Jaya Sri Widayanto Kaderi. Pihaknya saat ini dalam tahap menuju ke sana.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya menambah pasokan air baku, antara lain dengan mengeruk saluran Tarum Barat.

"Seharusnya kapasitas Tarum Barat itu 21 meter kubik per detik. Namun, karena terjadi sedimentasi, saat ini air baku yang bisa dialirkan hanya 16 kubik per detik. Kami sedang mengeruk dan membuat pagar di saluran itu," kata Hasan.

(MKN/ARN/GAL/RAY/FRO/NDY)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Hutama Karya Ditugaskan Pemerintah	<div><div>- Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah</div><div>- Penugasan ini akan berimplikasi pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan</div><div>- Pemerintah harus lebih inovatif guna mewujudkan pembangunan jalan tol tersebut, salah satunya mengambil alih jalan tol yang internal rate of return (IRR) nya dibawah 16%</div></div>				PT. Utama Karya	

► TRANS-SUMATRA

Hutama Karya Ditugaskan Pemerintah

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum menugaskan pengerjaan jalan tol trans-Sumatra oleh BUMN konstruksi PT Utama Karya merupakan penugasan bukan penunjukan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menanggapi pernyataan yang mengatakan pengerjaan jalan tol trans-Sumatra cacat hukum.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Centre for Information Development Studies (CIDES) yang juga Dosen FISIP Universitas Nasional Hilmi R. Ibrahim mengatakan sistem penunjukan langsung itu, melanggar Pasal 51 Ayat 1 UU No. 38/2004 tentang Jalan.

Dalam UU itu disebutkan penggunaan jalan tol yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 4 dilakukan

melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

“Untuk pekerjaan yang secara finansial layak, itu memang harus ditenderkan. Akan tetapi untuk yang tidak layak finansialnya, pemerintah boleh lakukan sesuai kewenangannya,” jelas Hermanto, Jumat (15/3).

Dia menjelaskan melalui kewenangannya tersebut, pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

“Karena BUMN milik pemerintah, jadi mewakili pemerintah dan digaribawahi itu merupakan penugasan.”

Penugasan ini, lanjutnya, akan berimplikasi pada percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Apalagi pertumbuhan pembangunan jalan tol di Indonesia ha-

Proyek Jalan Tol Utama Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Perkiraan Investasi (Rp Triliun)
Lampung-Palembang	358	17	44
Palembang-Pekanbaru	610	13	95
Pekanbaru-Medan	548	16	64
Medan-Banda Aceh	460	9	95
Palembang-Bengkulu	303	9	63
Pekanbaru-Padang	242	11	35
Medan-Sibolga	172	7	30

Sumber: Kementerian PU

nya 30 km setiap tahunnya. Kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan negara lainnya.

“Seperti yang kita tahu, di negara lain, pembangunan jalan tol per tahunnya mencapai ratusan, bahkan ada yang ribuan kilome-

ter,” paparnya.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah yang lebih inovatif guna mewujudkan pembangunan jalan tol tersebut, salah satunya dengan mengambil alih jalan tol yang internal rate of return (IRR)-nya di bawah 16%.

Hermanto menyampaikan jalan tol tersebut memang tidak layak mengingat selama masa konsesi yang akan diberikan tidak bisa untuk mengembalikan biaya pembangunan.

“Sekarang kan sudah diidentifikasi berapa IRR-nya. Dari situ jadi ketahuan ada gap yang mesti didukung pemerintah. Jadi intinya dengan menggunakan pendanaan pemerintah dan tugas dia hanya membangun tol itu,” pungkasnya. (Dimas Novita S.)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pengembangan Belawan Dikerjakan Semester II	<div>- Pemerintah telah mengesahkan rencana induk pengembangan pelabuhan peti kemas Belawan dan telah mengeluarkan surat persetujuan prinsip Menteri Perhubungan.</div> <div>- Pelabuhan Belawan pascapengembangan akan dapat menampung kapal ukuran jumbo</div> <div>- Peningkatan sarana dan prasarana dermaga hingga 2012 telah mendorong produktivitas terminal peti kemas belawan dari 800.000 TEUs menjadi 1,2 juta TEUs</div>			Rp. 3,7 triliun	PT. Pelindo I	

► PROYEK PELINDO I

Pengembangan Belawan Dikerjakan Semester II

JAKARTA—Pelabuhan Indonesia I mulai mengerjakan proyek pengembangan pelabuhan petikemas Belawan, Medan pada semester II tahun ini.

Henrykus F. N. Wido
redaksi@bisnis.co.id

Bambang Eka Cahyana, Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia I menjelaskan pengembangan pelabuhan peti kemas Belawan secara bertahap sejak 2013 hingga 2014. Pelindo I membutuhkan dana Rp3,7 triliun untuk pengembangan sejumlah pelabuhan seperti Belawan dan pelabuhan Kuala Tanjung pada 2013 hingga 2014. Pada tahun ini, target dana investasi mencapai Rp1,43 triliun, yang terdiri dari Rp317 miliar dari kas internal PT Pelindo I dan

Rp296 miliar pinjaman perbankan. Dana lainnya sebesar Rp210 miliar ditargetkan berasal dari mitra yang ingin melakukan kerja sama, Rp200 miliar dari pinjaman asing, dan sisanya berasal dari pembiayaan lain-lain. Bambang menyatakan pengembangan pelabuhan Belawan akan dikembangkan dalam dua paket proyek. Kedua paket tersebut masing-masing meliputi penambahan dermaga sepanjang 350 meter, lapangan penumpukan kontainer atau *container yard* seluas 15 hektare, dan pengadaan empat unit

alat bongkar muat, seperti *container crane*. "Pengembangan pelabuhan peti kemas Belawan ini akan meningkatkan kapasitas terminal menjadi hingga 800.000 TEUs," ujar Bambang, Jumat (15/3). Desain teknis pelabuhan telah diselesaikan. Pelindo I sedang menunggu penerbitan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pelabuhan Belawan pascapengembangan akan dapat menampung kapal ukuran jumbo, seperti *post panamax*. Menurut Bambang, pemerintah telah mengesahkan rencana induk pengembangan pelabuhan peti kemas Belawan dan telah mengeluarkan surat persetujuan prinsip Menteri Perhubungan. Pelindo I juga tengah menegosiasikan koneksi pelabuhan

peti kemas Belawan dengan Kementerian Perhubungan. Dia menjelaskan sejak 2010 pihaknya telah merencanakan mengerjakan sejumlah proyek strategis pelabuhan di wilayah kerja Pelindo I, di antaranya peningkatan kapasitas panjang dermaga menjadi 100 meter dan luas lapangan penumpukan hingga 6.000 meter. Peningkatan sarana dan prasarana dermaga hingga 2012 telah mendorong produktivitas terminal peti kemas Belawan dari 800.000 TEUs menjadi 1,2 juta TEUs. Pelindo I juga menargetkan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, pelabuhan terbesar kedua di Sumatra Utara setelah Belawan, pada tahun ini, menjadi pelabuhan kontainer di wilayah Indonesia Barat. Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan memiliki lapangan penumpukan seluas 40 hektare, 10 unit peralatan bongkar muat

container crane, 30 unit *transloader*, dan menampung kapal peti kemas dengan jenis *post panamax*. Pelabuhan yang juga dijadikan sebagai *hub* logistik Indonesia Barat dalam sistem logistik nasional itu ditargetkan dapat menampung 25 juta TEUs peti kemas per tahun. Rencana induk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung telah disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Pelindo tengah menunggu keluarnya izin Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung, menurut Bambang, sangat mendesak karena pelayaran di jalur selat Malaka dilalui oleh sejumlah operator pelayaran besar. Potensi angkutan petikemas yang melalui Selat Malaka mencapai 51,56 juta TEUs pada 2012. Pelabuhan Kuala Tanjung juga ditargetkan dapat dihubungkan dengan kawasan ekonomi khusus industri Sei Mangkei. Akses jalur kereta api

- Investasi pengembangan pelabuhan Rp3,7 triliun.
- Desain teknis pelabuhan telah diselesaikan.
- Jalur KA industri Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dioperasikan 2014.

dari kawasan ekonomi khusus industri Sei Mangkei sepanjang 21 km dari Bandar Tinggi menuju Pelabuhan Kuala Tanjung dikerjakan oleh Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Anggaran pengembangan jalur kereta api mencapai Rp430 miliar yang bersumber dari APBN 2013 hingga 2014. Pada kesempatan terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan menyatakan pengembangan jalur KA Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung sedang dalam pengerjaan oleh Ditjen Perhubungan. □





Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Ekspansi di Kaltim Rp. 3 triliun	<div>- Luas lahan yang diperlukan untu pembangunan pabrik semen di Kaltim minimal 500 hektare</div> <div>- Lokasi pabrik cenderung dipilih di wilayah yang berdekatan dengan laut untuk memudahkan proses distribusi setelah produk dihasilkan</div> <div>- Anggaran pembangunan pabrik diproyeksikan berasal dari kas internal</div>				PT. Semen Indonesia	

SEMEN INDONESIA

Ekspansi di Kaltim Rp3 Triliun

BALIKPAPAN—PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berencana merealisasikan pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur pada 2015 dengan menggelontorkan investasi sekitar Rp3 triliun.

Rachmad Subiyanto
rachmad.subiyanto@bisnis.co.id

Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan pembanguan pabrik semen di Kalimantan termasuk dalam rencana strategis pengembangan bisnis perseroan. Rencana itu pun telah disampaikan kepada Gubernur Kaltim dalam berbagai kesempatan. "Berdasarkan informasi, potensi di Kaltim cukup bagus. Tim kami sedang melakukan kajian awal guna mencari lokasi yang tepat untuk dibangun pabrik tersebut," ujarnya di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengantongan semen di Balikpapan, Sabtu (16/03).

Semen Indonesia berencana melakukan survei lapangan hingga

2014 untuk mencari lokasi pabrik. Dwi berharap pembangunan pabrik bisa mulai dilakukan paling lambat pada 2015.

Syarat utama yang harus dipenuhi untuk membangun pabrik, tuturnya, yakni ketersediaan cadangan bahan baku yang memadai, infrastruktur yang baik, dan dukungan dari masyarakat.

Apabila salah satunya tidak dipenuhi, kata Dwi, investasi itu akan terhambat sehingga pembangunan pabrik sulit direalisasikan.

Luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan pabrik semen di Kaltim minimal 500 hektare, bergantung pada cadangan bahan baku di sekitar pabrik. Namun, angka itu masih perkiraan kebutuhan awal.

Lokasi pabrik cenderung dipilih

di wilayah yang berdekatan dengan laut untuk memudahkan proses distribusi setelah produk dihasilkan. Rencananya, pabrik tersebut diproyeksikan menjadi *strategic point* yang dapat memasok kebutuhan semen di Kalimantan.

Bahkan, lanjut Dwi, apabila Masyarakat Ekonomi Asean sudah berjalan efektif, pabrik di Kaltim bisa dijadikan sebagai pusat pengiriman untuk Brunei Darussalam dan Sabah, Malaysia.

Anggaran pembangunan pabrik diproyeksikan berasal dari kas internal. Dwi yakin kemampuan kas perseroan masih cukup kuat melihat kondisi keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

"Akhir tahun lalu kami memiliki kas Rp3 triliun dan tahun ini diperkirakan bisa menghasilkan Rp4 triliun sehingga bisa Rp7 triliun. Kalau cuma mengeluarkan Rp3 triliun, kami rasa cukup mampu."

3 LOKASI

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan ada tiga daerah potensial yang bisa dijadikan lokasi pabrik semen tersebut, yakni di Kabupaten Paser, Kabupaten Be-

- ▶ Semen Indonesia masih mencari lokasi yang tepat untuk pabrik semen di Kaltim.
- ▶ Anggaran pembangunan pabrik diproyeksikan berasal dari kas internal.
- ▶ Pemprov menawarkan tiga lokasi pabrik, yakni di Paser, Berau, dan Kutai Timur.

rau, dan Kabupaten Kutai Timur. Semen Indonesia bisa langsung memilih lokasi itu karena pihaknya sudah melakukan survei awal.

"Kami sudah mendata batuan karst mana yang masuk dalam konservasi, mana yang tidak. Semen Indonesia bisa pilih di lokasi yang tidak termasuk dalam konservasi," ujarnya.

Awang berharap pembangunan pabrik itu terealisasi sehingga pasokan kebutuhan semen di Kaltim bisa tercukupi. Selain itu, pabrik tersebut mampu memasok kebutuhan semen daerah lain di Kalimantan. (Sukirno)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Riau Butuh Infrastruktur	<div>- Selama ini para investor masih enggan membangun industri hilir sawit di Riau karena dukungan infrastruktur dasarnya belum memadai</div> <div>- Selama ini, petani dan pengusaha sawit memang masih mengandalkan pasar ekspor bukan karena semata tergiur harga tinggi, tetapi memang pasar dalam negeri yang terbatas</div>					

► BISNIS SAWIT

Riau Butuh Infrastruktur

PEKANBARU—Wakil Gubernur Riau Mambang Mit menegaskan pembangunan industri hilir kelapa sawit di provinsi ini memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur, terutama listrik, jalan dan pelabuhan.

Menurutnya, selama ini para investor masih enggan membangun industri hilir sawit di Riau karena dukungan infrastruktur dasarnya belum memadai.

"Investor itu, kalau analisis bisnisnya menguntungkan tidak perlu diundang atau dipaksa. Mereka pasti datang sendiri. Kalau investor belum mau menanamkan investasinya berarti masih ada sesuatu yang menghalangi," katanya saat bersilaturahmi dengan para wartawan di Pekanbaru, Sabtu (16/3).

Dia mengatakan infrastruktur dasar yang belum mendukung adalah pasokan listrik. Rasio elektrifikasi di Riau masih sekitar 50%, di bawah rata-rata nasional. Padahal, lanjutnya ketersediaan listrik merupakan faktor vital untuk membangun sebuah industri.

Dia menyadari dengan luas perkebunan sawit yang mencapai 2,2 juta hektare, Riau merupakan wilayah potensial untuk membangun pabrik turunan dari kelapa sawit.

Selama ini, petani dan pengusaha sawit memang masih mengandalkan pasar ekspor bukan karena semata tergiur harga tinggi, tetapi memang pasar dalam negeri yang terba-

tas.

"Ke depan, infrastruktur dasar ini, terutama listrik, jalan, dan air bersih yang harus kami siapkan agar di Riau juga bisa segera dibangun industri hilir sawit," jelasnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, pertumbuhan ekonomi Riau dengan minyak dan gas bumi sepanjang 2012 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni turun dari 5,04% menjadi 3,55%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Mawardi Arsyad mengungkapkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Riau dengan migas terutama disebabkan oleh kegiatan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan impor, sehingga neraca perdagangan menjadi defisit.

Padahal, imbuhnya, kontribusi sektor migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau mencapai 35,46%.

"Selama ini, migas selalu mengganggu pertumbuhan ekonomi di Riau, dan menyebabkan pertumbuhan ekonominya melambat," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sebaliknya, tingkat pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas selalu mengalami kenaikan yang cukup bagus setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas pada 2012 mencapai 7,82% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,76%. (Asep Dadan Muhanda)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ Jan ☐ Feb ☒ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Penutupan M1 Masih Dikoordinasikan	<div>- Rencana penutupan itu pasti akan dilakukan mengingat hal itu sudah sesuai dengan program pengembangan bandara internasional</div> <div>- Manajemen AP II sebelumnya berencana menutup pintu M1 pada awal Januari tahun ini agar tidak mengganggu pembangunan rel kereta api</div> <div>- Pintu M1 akan ditutup seiring dengan grand design bandara, dan pintu pengganti sedang disiapkan</div>				PT. Angkasa Pura II	

AKSES SOEKARNO-HATTA

Penutupan M1 Masih Dikoordinasikan

JAKARTA—Rencana PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta menutup pintu M1 atau akses dari Tangerang ke bandara masih tertahan karena belum selesainya koordinasi dengan pihak terkait.

M. Tahir Saleh
bisnis.co.id

Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura II Trisno Heryadi mengatakan pihaknya akan menyampaikan secara resmi kapan pintu M1 itu akan ditutup. Hingga saat ini, persoalan masih dalam tahap berkoordinasi dengan para pihak terkait.

Namun, dirinya menegaskan rencana penutupan itu pasti akan dilaku-

kan mengingat hal itu sudah sesuai dengan program pengembangan bandara internasional.

"Tidak ada yang sulit, hanya saja kapan harus kami sampaikan [penutupan pintu M1], memerlukan waktu yang tepat," katanya dihubungi di Jakarta, Minggu (17/3).

Pelaku usaha yang mengetahui rencana penutupan itu mengungkapkan manajemen Angkasa Pura II (AP II) sebelumnya sudah memberikan mak-

lumat kepada mereka soal penutupan pintu M1 pada Mei tahun ini. Para pihak terkait, dalam pengumuman itu diharapkan mempersiapkan diri.

"Kami sudah dapat pengumuman dari AP II bahwa pintu M1 yang dari arah Rawa Bokor itu ditutup, rencananya Mei nanti," kata salah seorang pelaku usaha.

Trisno mengatakan informasi jadwal penutupan itu memang baru dalam program tetapi secara resmi belum bisa diinformasikan. "[Mei tutup], itu kan baru program, secara resmi kami belum kami katakan. Pelaku usaha bukan berarti pemberi keputusan *kani*?" katanya.

Dia menegaskan BUMN yang mengelola 13 bandara komersial di Indonesia bagian Barat itu pasti akan menutup pintu M1 tetapi ada beberapa pemangku kepentingan yang perlu diakomodasi.

"Hari Senin besok [18/3] baru akan ditandatangani kontrak T3 *ultimate*, mudah—mudahah pada hari itu kami akan informasikan secara resmi soal pintu M1 ini. Ada juga *airlines* sebagai mitra kerja dan beberapa *stakeholders* yang lain perlu diakomodir," katanya.

Manajemen AP II sebelumnya berencana menutup pintu M1 pada awal Januari tahun ini agar tidak mengganggu pembangunan rel kereta

api rute Kunciran—Bandara Soekarno-Hatta di samping memberikan keamanan dalam kawasan bandara.

Rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk membangun jalur rel kereta menuju bandara. Dalam pembangunan jalur rel kereta ini nantinya truk—truk proyek tersebut yang diperbolehkan masuk ke area bandara.

PINTU PENGANTI

Humas Bandara Soekarno—Hatta (Soetta) Yudis Setiawan mengatakan penutupan pintu M1 itu seiring dengan rencana utama pengembangan bandara atau *grand design*. Pihaknya akan mempersiapkan pengganti dari pintu M1. "Tentu M1 akan ditutup seiring dengan *grand design* bandara. Kami sedang disiapkan penggantinya, tetapi kami belum lapor untuk hal ini ke Wali Kota Tangerang, jika

sudah akan kami kabari setelah wali kota dilaporkan."

Trisno menegaskan Pemkot Tangerang dalam hal ini sebagai pemerintah daerah tentu saja mendukung rencana itu, tetapi dia menegaskan sekali lagi bahwa koordinasi perlu lebih intensif.

"Tidak, pemda tentu saja akan mendukung hanya saja perlu ada koordinasi yang lebih intensif. Tidak ada yang sulit hanya saja kapan harus kita sampaikan, memerlukan waktu yang tepat. *Stakeholders* lain perlu diakomodasi juga," katanya.

Pihaknya mendesak pemerintah menyosialisasikan hal tersebut sekaligus memberikan insentif kepada pengusaha. Organda juga mendesak pemerintah menyiapkan peta jalan atas implementasi dari UU tersebut yang dinilai belum transparan terutama soal izin. □

► Rencana penutupan Mei mendatang.

► Sejumlah pemangku kepentingan yang perlu diakomodasi.

► Pintu pengganti dipersiapkan.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
WMO Dapat Tambahan 5.4—Barel per Hari	<div>- PHE WMO menemukan cadangan migas di enam sumur eksplorasi dengan rasio keberhasilan 100%</div> <div>- Tambahan produksi diharapkan memberikan kontribusi meningkatkan lifting nasional</div> <div>- WMO menargetkan rata-rata produksi tahun ini bisa mencapai 20.000 barel per hari</div>				Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	

► PRODUKSI MINYAK

WMO Dapat Tambahan 5.400 Barel per Hari

JAKARTA—Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore mendapat tambahan produksi minyak sebesar 5.400 barel per hari dari lapangan PHE KE-38B. Pada awal Maret, produksi WMO tercatat sekitar 9.000 barel per hari.

Rendy Astria
redaksi@bisnis.co.id

Selain menghasilkan minyak 5.400 barel per hari, pengembangan lapangan PHE KE-38B yang merupakan bagian dari rencana pengembangan (*plan of development/POD*)

► PHE WMO menemukan cadangan migas di enam sumur eksplorasi dengan rasio keberhasilan 100%.

► Tambahan produksi diharapkan memberikan kontribusi meningkatkan lifting nasional.

► WMO menargetkan rata-rata produksi tahun ini bisa mencapai 20.000 barel per hari.

pada 2012, juga menghasilkan produksi awal gas sebesar 5 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

Perincian tambahan itu, sebesar 2.100 barel per hari dan 5 MMscfd diproduksi dari Sumur PHE KE-38B1, sedangkan sebesar 3.300 barel per hari berasal dari Sumur PHE KE-38B2.

Adapun keseluruhan proses dari eksplorasi sampai ke produksi awal diselesaikan hanya dalam kurun waktu 8 bulan 21 hari.

Penemuan ini berhasil, setelah sebelumnya PHE WMO berhasil menemukan cadangan migas baru di enam sumur eksplorasi dengan rasio keberhasilan 100%.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan proses mulai eksplorasi hingga produksi awal bisa dilakukan secara cepat dan hal ini merupakan capaian yang luar biasa.

Menurutnya, pembahasan peneemuan eksplorasi untuk pengembangan (PED) telah dimulai secara intensif sejak sumur pertama selesai dibor. Dengan demikian, semua formalitas yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat, yang prosesnya hanya 2 hari setelah tuntasnya pengeboran sumur ketiga.

"Dengan proses yang cepat, pengeboran dapat dilakukan pada akhir November 2012 dan setelah secara teknis POD disetujui, penyelesaian pekerjaan platform dilakukan bersamaan dengan pemboran. Platform diselesaikan Januari 2013," kata Ali, Minggu (17/3).

Padahal, penyelesaian pipa produksi antara lapangan PHE KE-38B dan KE-38A sempat terhambat cuaca buruk pada Januari dan Februari. Namun, setelah cuaca membaik, pipa produksi diselesaikan pada 11 Maret 2013 dan produksi pertama sumur PHE KE-38B-1 dapat dialirkan 2 hari kemudian.

KONTRIBUSI

Tambahan produksi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi target pemerintah untuk meningkatkan lifting nasional. Selain itu, ini juga merupakan wujud komitmen PHE WMO untuk bisa menahan *declining rate* dan sesegera mungkin meningkatkan produksi.

kin meningkatkan produksi.

Pada awal Maret 2013, General Manager PHE WMO Imron Asjhari mengatakan produksi WMO baru 9.000 barel per hari. WMO menargetkan rata-rata produksi tahun ini bisa mencapai 20.000 barel per hari.

Dia yakin produksi WMO akan terus meningkat. Pada pertengahan 2013, produksi akan menjadi 20.000 barel per hari dan puncaknya 25.000 barel per hari pada kuartal terakhir, sehingga rata-rata sepanjang 2013 bisa 20.000 barel per hari.

Target 20.000 barel per hari tersebut sesuai dengan program kerja dan anggaran. Pada 2014, WMO ditargetkan produksi minyak hingga di atas 30.000 barel per hari.

Imron mengatakan saat ini pihaknya sudah mempunyai empat menara pengeboran dan sedang membangun empat platform (*anjungan*). "Tahun ini kami akan membor 30 sumur yang terdiri dari 21 sumur pengembangan dan sembilan sumur eksplorasi."

Selain sudah bisa mendapat tambahan produksi, PHE WMO juga mendapat cadangan baru dari sumur pertama eksplorasi 2013 PHE 53-2. Tambahan cadangan baru tersebut juga mempertegas komitmen PHE WMO untuk menjaga kelanjutan produksi migas di wilayah kerjanya. ☒